# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

## 2.1 Tinjauan Pustaka

### 2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau masyarakat lainnya. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interpendensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Banyak definisi yang dikemukakan mengenai apa yang dimaksud dengan studi Hubungan Internasional. Karen Mingst menyatakan bahwa Hubungan Internasional adalah studi yang mempelajari tentang interaksi diantara berbagai macam aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang mencakup negara, organisasi internasional, organisasi non-Pemerintah, kesatuan sub nasional seperti birokrasi dan Pemerintahan lokal, dan para individu.

> "Hubungan internasional adalah studi tentang interaksi antara berbagai aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, termasuk negara bagian, organisasi internasional organisasi non-Pemerintah, entitas sub nasional seperti Pemerintah daerah dan individu" (Wijatmadja, 2016: 4-5).

Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state-actor*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*coorperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*).

Studi hubungan internasional juga sering diartikan sebagai studi tentang interaksi antar aktor-aktor di dunia. Interaksi ini terjadi berdasarkan kepentingan nasional masing-masing negara yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar. Kepentingan nasional dibagi menjadi empat jenis yaitu, ideologi, ekonomi, keamanan dan*prestige*. Untuk memperjuangkan kepentingannya, masing-masing negara mewujudkannya dalam kebijakan luar negeri atau politik luar negeri dan juga kedalam negeri.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas, kami berpendapat bahwa hubungan internasional adalah interaksi atau hubungan yang dilakukan oleh para aktor di panggung internasional, melintasi batas-batas kedaulatan negara. Aktor hubungan internasional mencakup aktor negara dan bukan negara. Semua interaksi yang dilakukan merupaka fokus kajian studi ilmu hubungan internasional. Oleh sebab itu, disiplin hubungan internasional merupakan disiplin yang interdisipliner dan bidang studi yang dipelajari sangat beragam. Bidang-bidang yang dikajinya mencakup banyak hal, seperti: politik internasional, ekonomi internasional, hukum internasional, organisasi internasional, diplomasi, Analisa politik luar negeri, studi strategis, konflik dan perdamaian, dan ekonomi politik internasional. Ketika isu-isu baru muncul dalam hubungan internasional sebagai mata kuliah baru. Misalnya pada tahun 1980-an kita mengenal masalah-masalah lingkungan, gloBalisasi, dimensi internasional komunikasi dan lain-lain (Wijatmadja, 2016: 7-8).

Hubungan internasional adalah suatu bidang pengetahuan, dalam mana hampir setiap orang, dari wartawan, ibu rumah tangga, seorang pekerja ddan lain-

lain turut menunjukan sikap prihatin, seolah-olah dia seorang pengamat yang berkepentingan dalam masalah ini dan dapt berbincang secara berapi-api.

### 2.1.2 Diplomasi

Diplomasi adalah seni atau ilmu yang harus dilakukan sehubungan dengan transaksi urusan-urusan antara negara-negara berdaulat dengan menggunakan sarana agen-agen terakreditas (diakui) dan menurut hukum internasioal; metode atau prosedur yang di terapkan dalam manajemen negosiasi internasional. Definisi ini mengandung pengertian bahwa hanya agen-agen terakreditas yang melakukan diplomasi, diplomasi dibatasi pada perlakuan urusan-urusan antara dua negara (bilateral), meskipun diplomasi multilateral juga dikenal luas (Wijatmadja, 2016: 146).

Kadang kala istilah diplomasi disepadankan dengan hubungan inernasional atau masalah-masalah dunia (*international relations and world affairs*), hubungan-hubungan luar negeri (*foreign relations*), cara melakukan hubungan luar negeri (*conduct of foreign relations*), implementasi politik luar negeri (*implementation of foreign policy*), komunikasi(*officials communications*), dan negosiasi (*negotiation*). Diplomasi sering dianggap sebagai padanan dari hubungan internasional, tetapi perhatiannya lebih ditekankan pada kejadian-kejadian atau penyebab peristiwa tersebut, kebijakan, konsekuensi politik dan lain-lain sehingga pengertiannya tidak bias disamakan dengan hubungan internasional secara keseluruhan. Jika dianggap diplomasi itu padanan dari hubungan luar negeri, hubungan-hubungan itu memiliki dua komponen yaitu kebijakan luar negeri dan tatacara hubungan luar negeri.

Diplomasi lebih dekat kepada tatacara hubungan luar negeri (*conduct of foreign policy*) dari pada kebijakan luar negeri (*foreign policy*). Diplomasi dianggap sebagai implementasi kebijakan luar negeri yang mengandung pengertian bahwa bukan pada kebijakannya atau pembuat kebijakan tersebut maksud dari diplomasi. Diplomasi adalah metode utama yang dengannya politik luar negeri dijalankan, suatu cara dan prosedur yang dengannya negara-negara bangsa melakukan urusan politik dan urusan lain sesame mereka pada masa damai (Wijatmadja, 2016: 147).

Sebuah definisi yang paling dekat terkait dengan metode dan isi adalah diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi, dan militer kepada negara-negara yang telibat dalam aktivitas diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsensi antara para pelaku negosiasi. Untuk memperoleh sebuah kepentingan nasional, syarat utama seorang diplomat membutuhan keterampilan untuk dapat terlibat dalam politik internasional dalam berdiplomasi, yang pada dasarnya dipergunakan untuk mencapai kompromi, kesepakatan, dan untuk menyelesaikan masalah dimana tujuan-tujuan Pemerintah saling bertentangan. Diplomasi dapat diselengarakan dalam pertemuan khusus atau konfrensi umum. Diplomasi berupaya untuk merubah kebijakan, tindakan, tujuan, dan sikap Pemerintah negara lain dan diplomat-diplomatnya melalui persuasi, menawarkan penghargaan, saling mempertukarkan konsensi atau mengirimkan ancaman (Djelantik, 2008: 4).

Secara sederhana, diplomasi bisa didefinisikan sebagai proses politik yang dengannya entitas politik, umumya negara, melakukan hubungan-hubungan luar negeri satu sama lain dalam lingkungan internasional. Dalam definisi yang lebih

lengkap bisa dikatakan bahwa diplomasi adalah proses politik yang dengannya entitas politik, pada umumnya negara, mengadakan dan memelihara atau mempertahankan hubungan-hubungan resmi, langsung mapupun tidak langsung, satu sama lain dalam rangka mengejar tujuan, maksud, dan kepentingan mereka masing-masing, dan kebijakan-kebijakan procedural atau hakiki dalam lingkungan internasional. Sebagai proses politik, diplomasi itu dinamis sifatnya, adaptif dan berubah. Diplomasi juga menyatakan suatu *continuum* (keberlanjutan), yang secara fungsinonal mencakup pembuatan dan implementasi politik luar negeri pada semua level, secara terpusat dan dilapangan, serta melibatkan fungsi-fungsi representasi, reporting, komunikasi, negosiasi, maneuver, dan peduli pada kepentingan nasional di luar negeri (Wijatmadja, 2016: 147-148).

Diplomasi merupakan suatu istilah yang memiliki pengertian berbeda bergantung dari pengguna dan penggunaannya. Dalam dunia politik, diplomasi mengacu pada proses komunikasi antara aktor-aktor internasional yang berusaha menyelesaikan konflik atau permasalahan melalui proses negosiasi (Brian white: 2005).

Diplomasi dapat di pahami dalam dua perspektif besar pada kaitannya dengan politik dunia. Perspektif pertama yaitu perspektif makro. Perspektif makro mencoba untuk memahami politik dunia secara keseluruhan, apa saja bagian-bagian penyusunnya, dan bagaimana mereka dapat tersusun bersama-sama. Melalui perspektif makro diplomasi dipandang secara umum sebagai hubungan negara dan sebagai proses global. Sedangkan dalam perspektif mikro, diplomasi dipahami sebagai wawasan perilaku aktor dalam sistem global. Diplomasi lebih

didefinisikan sebagai instrument kebijakan dalam mencapai kepentinganya dibandingkan sebagai proses global.

Dalam praktek diplomasi, banyak berkembang metode diplomasi lain seperti:

a) *Covert Diplomasi*, yaitu diplomasi yang dilakukan satu atau beberapa pihak untuk menciptakan situasi dan kondisi yang menguntungkan mereka sebelum melakukan perundingan.
b) *Machiavelli Diplomacy,* yaitu diplomasi berdasarkan pengertian dihalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan.
c) *Gunboat Diplomacy,* yaitu diplomasi dengan menggunakan ancaman dan mengirimkan kapal perang.
d) *Pingpong Diplomacy,* yaitu cara pendekatan, misalnya sebelum meningkat pada pembukaan hubungan diplomatik, menyelenggarakan pertandingan pingpong antara Amerika Serikat dengan RRC pada masa Pemerintahan presiden Nixon (Deplu R.I, 2004).

Diplomasi merupakan sarana pelaksanaan hubungan antar bangsa atau hubungan inetrnasional. Dipomasi adalah perangkat terwujudnya proses-proses interaksi yang memberikan dasar bagi tindakan lebih lanjut bagi suatu negara selain itu diplomasi memberikan makna keberlangsungan komunikasi antar para diplomat sebagai wakil suatu negara dalam mewujudkan harapan-harapan Bersama (Subagyo, 2010: 185).

Melalui peran media massa, masyarakat dapat berkomunikasi tanpa sebuah halangan birokratis. Peran media massa telah menegaskan ide “diplomasi tanpa diplomat”. Perkembangan lain adalah peranan media massa dalam mengatur

mekanisme diplomasi. Media sering kali dianggap sebagai sebuah penunjang mapun sebuah penghambat (Surya, 2011: 58).

> "Diplomasi adalah kunci dalam proses komunikasi dan negosiasi dalam dunia politik internasional dan merupakan inetrumen kebijakan luar negeri yang sangat penting yang digunakan oleh aktor global, dalam hal ini diplomasi sangat menunjukan keterpaduan dengan yang menjadi kajian dalam ilmu hubungan internasional" (Baylis & Smith, 2001).

Diplomasi untuk memperoleh pengakuan kedaulatan merupakan sebuah langkah penting bagi negara, yang dikaitkan dengan implementasi hukum internasional. Pada kenyataanya pengakuaan oleh sebuah negara merdeka lebih banyak dilandasi alasan politik.

> "Diplomasi menjadi instrument yang paling tepat dan sesuai untuk memperoleh pengakuaan internasional. Dalam melaksanakan praktik diplomasi antar negara dibutuhkan kecermataan serta kebijaksanaan yang harus tercermin dari tingkah laku, strategi, serta keputusan dalam proses tawar menawar serta Tarik ulur kepentingan" (Djelantik, 2016: 138).

Diplomasi bilateral dilakukan antar negara yang mengacu pada hubungan dalam bidang politik, ekonomi, dan social budaya. Diplomasi tidak hanya dapat digunakan sebagai alat resolusi konflik, tetapi juga untuk mempertahankan kondisi atau hubungan yang kondusif untuk mencapai kepentingannya. Diplomasi merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri yang bersifat berkelanjutan. Tugas utama diplomasi adalah promosi dan menjangkau masyarakat (*outreach*), seperti membangun, memperkuat, dan memperkaya hubungan diplomatik.

Melakukan negosiasi tidak mesti berarti bahwa suatu usaha sedang dilakukan oleh dua pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan satu sama lain meskipun ini sering menjadi motif utama dari suatu pertemuan yang diatur antara para diplomat dan negarawan. Maksud dari banyaknya konferensi

bilateral maupun internasional, pada bagian lain, adalah untuk memelihara hubungan-hubungan poitik maupun nonpolitik yang akan meningkatkan nilai-nilai kepentingan bersama. Konprensi itu juga memungkinkan untuk diarahkan kepada usaha untuk mengurangi polemik politik atau memperoleh kesempatan untuk mempelajari usul-usul pihak lain, apabila mungkin dan untuk menyiapkan dasar-dasar bagi penyelesaian masalah yang menonjol pada saat itu, negosiasi yang dilaksanakan bagi kasus-kasus yang menonjol mempunyai tujuan diplomatik jangka panjang. Dalam mengkaji definisi-definisi yang telah disebut diatas, beberapa hal tampak jelas. *Pertama,* jelas bahwa unsur pokok diplomasi adalah negosiasi. *Kedua,* negosiasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara. *Ketiga,* tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dilaksanakan dengan sarana damai. Oleh Karena itu pemeliharaan perdamaian tanpa merusak kepentingan nasional adalah tujuan utama diplomasi. Tetapi apabila cara damai gagal untuk menjaga kepentingan nasional, maka kekuatan boleh digunakan. Merupakan kenyataan umum bahwa keterkaitan erat antara diplomasi dan perang. Jadi point *keempat* bisa dinyatakan sebagai suatu Teknik-teknik diplomasi yang sering dipakai untuk menyiapkan perang dan bukan untuk menghasilkan perdamaian. *Kelima,* diplomasi dihubungkan dengan tujuan politik luar negeri suatu negara. *Keenam,* diplomasi modern dihubungkan dengan sistem suatu negara. *Ketujuh,* diplomasi juga tak bisa dipisahkan dari perwakilan negara. Bagi negara mana pun, tujuan utama diplomasinya adalah pengamanan kebebasan politik dan integritas teritorialnya. Ini bisa dicapai dengan memperkuat hubungan dengan negara sahabat, memelihara hubungan dengan negara sehaluan dan menetralisir negara

yang memusuhi. Persahabatan bisa dibina dengan cara menjaankan negosiasi yang bermanfaat.

### 2.1.3 Negosiasi

Dalam berbagai literatur, kata "negosiasi" berasal dari ungkapan Bahasa latin, *"negotiatius"* yang berasal pula dari kata *"negotiare"* yang mempunyai arti "untuk melakukan bisnis". Negosiasi dalam hubungan internasional adalah sebuah fenomena yang telah mengkristal sebagaimana yang sering dilakoni oleh para diplomat dana atau negosiator dalam berbagai forum: bilateral, multirateral, maupun global, serta dalam berbagai substansinya baik yang dilakoni negara maupun non-negara. Hakekat negosiasi adalah menyangkut ilmu pengetahuan sekaligus seni. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial saat pihak pihak yang terlibat berusaha mencapai tujuannya yang berbeda dan bertentangan, sehingga tercapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal (Patrice, 2013: 5-7).

Pada hakekatnya tujuan melakukan negosiasi adalah untuk menghasikan *win-win solution* melalui saling pemahaman dari kedua belah pihak yang bernegosiasi, dimana di antara keduanya memperoleh apa yang diinginkan masing-masing, serta di antara mereka tidak ada yang dirugikan. Ketergantungan timbal Balik inilah yang melandasi adanya kesempatan untuk memperjuangkan suatu kepentingan. Sifat saling ketergantungan merupakan landasan bagi terciptanya interaksi negosiasi. Di dalamnya terdapat jenis-jenis kepentingan, jumlah, status, kendala dan peluangnya. Dalam suatu hubungan masing-masing pihak biasanya memiliki gagasan tentang jenis-jenis hasil yang diharapkan.

Melakukan negosiasi berkepentingan untuk mencapai tujuan dan dilakukan secara kontinuitas. Kondisi seperti ini hanya dapat berlangsung kalau di antara masing-masing pihak merasa saling membutuhkan dan memiliki tujuan yang sama, dan disepakati. Mencapai kesepakatan berarti mendapatkan apa yang diinginkan, dan pihak lain juga mendapatkannya (Patrice, 2013: 9).

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa negosiasi adalah suatu proses sistematis yang kompleks dan menuntut segala predikat kemampuan, maka memasuki tahapan proses negosiasi itu, para negosiator dihadapkan pada bagaimana mengikuti dan melaksakan negosiasi, dimana sering dinyatakan bahwa forum negosiasi adalaah medan pertempuran berbagai ide, keinginan, gaya dan emosi, strategi dan taktik, kepentingan itu sendiri. Terdapat elemen-elemen dari proses negosiasi yaitu;

a) *Warming up* atau pemanasan yang meliputi;
    1. *Welcoming atmosphere* (atmosfir pembuka)
    2. *First overview of issue* (gambaran awal dari isu)
b) *Present the party's position* atau memperkenalkan posisi masing-masing pihak, yang meliputi;
    1. *Opening bid* (penawaran pembuka)
    2. *Exchange arguments and positions* (bertukar argument dan posisi)
    3. *Gather informations* (mengumpulkan berbagai informasi)
c) *Edging closer* atau mendekati akhir dari negosiasi, yang meliputi;
    1. *Establish wishes and nends* (menetapkan keinginan dan kebutuhan)
    2. *Seek constructive solutions* (mencari solusi yang konstruktif)
    3. *Negotiate details* (detail-detal negosiasi)
d) *Conclusion or breakdown* atau kesimpulan, yang meliputi;

1. *Tie up packages for decision* (mengemas pilihan-pilihan)
2. *Signature of contract* atau penandatangan kontrak
3. *Breakdown of negotiation* (akhir dari negosisai) (Wijatmadja, 2016: 28-29).

Terdapat dua perbedaan bentuk prinsip, *pertama,* negosiasi disusun untuk mencapai sebuah hasil tertentu yang secara umum berupa perjanjian. *Kedua*, negosiasi adalah bentuk percakapan yang dalamnya melekat segala kemungkinan tentang kegagalan atau kesuksesan. Untuk dapat memasuki ranah negosiasi maka perlu dipahami prinsip-prinsip dari negosiasi itu, Yakni: *pertama*, negosiasi harus bersifat *negotiable* dalam artian masalah-masalah atau hal-hal yang akan dinegosiasikan adalah memang pantas dinegosiasikan. *Kedua,* terdapat dua atau lebih individu, ada dua pihak atau lebih, kelompok atau organisasi, serta negara, yang berada didalam situasi negosiasi negosiasi Karena memiliki kesamaan substansi, seperti hubungan buruh-majikan, bisnis antara dua perusahaan atau lebih, atas-bawahan, jabatan, serta antar-negara yang berkonflik atau berperang. *Ketiga,* terdapat pembedaan kepentingan antar dua pihak atau lebih, yakni apa yang diinginkan oleh suatu pihak, belum tentu diinginkan pihak lainnya. Masing-masing pihak harus mencari upaya untuk menyelesaikannya. *Keempat,* para pihak bernegosiasi karena didasari pemikiran bisa memanfaatkan beberapa bentuk pengaruh untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik antara kedua belah pihak. *Kelima,* para pihak, bernegosiasi untuk mencari kesepakatan dengan bernegosiasi daripada perlawanan secara terbuka, atau menyerahkan permasalahan mereka seperti sengketa atau konflik, ke otoritas yang lebih tinggi untuk mengatasinya. Dengan kata lain dalam konteks ini, negosiasi dilakukan manakala belum terdapat set aturan yang diterapkan. *Keenam*, dengan

bernegosiasi, masing-masing pihak berharap memberi dan menerima dalam bentuk memodifikasi permintaan ata tuntutan melalui pemberian konsensi atau jalaan kreatif lainnya untuk mendapatkan solusinya. *Ketujuh,* bersifat sukarela, dalam artian negosiasi dilakukan oleh para pihak merupakan murni untuk kebutuhan dan kepentingan masing-masing, bukan merupakan perantaraan pihak lain. *Kedelapan,* ngosiasi dilakukan untuk mendapatkan satu atau lebih tujuan. Mengidentifikasi kepentingan bersama dan menyepakatinya, memenuhi keinginan masing-masing, pengakuan terhadap perbedaan kepentingan dan kompromi atau mengombinasikan keduanya. *Kesembilan,* proses berlanjut, negosiasi bukan merupakan hal yang instan dalam artian dilakukan dan langsung selesai, melainkan suatu rangkaian proses yang panjang. *Kesepuluh,* menggunakan pihak ketiga. Seringkali terjadi suatu negosiasi tidak saling menemukan kesepakatan Karena beberapa hal. Oleh karena itu para pihak yang bernegosiasi menyerahkan ke pihak ketiga untuk membantu penyelesaiaannya (Patrice, 2013: 7-9)

### 2.1.4 Kepentingan Nasional

Dalam kepentingan nasional peran negara sebagai aktor dalam pengambilan keputusan dan memegang peranan penting dalam pergaulan internasional sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Kepentingan nasional merupakan kemampuan negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara mengeluarkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain yang bersifat kerjasama taupun konflik. Kepentingan yang demikian itu merupakan strategi dalam menjalankan kerjasama demi memenuhi kepentingan nasional yang

beragam. Negara menggunakan strategi untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Dimana strategi dilakukan untuk memperkirakan seberapa jauh hasil yang akan dicapai. Seperti yang digambarkan oleh Jon C. Pevehouse dalam bukunya yang berjudul International Relations:

> (Pelaku menggunakan strategi untuk mengejar hasil yang baik dalam tawar menawar dengan satu atau lebih aktor lainnya. Negara-negara menggunakan daya kemampuan sebagai pengaruh untuk saling mempengaruhi tindakan masing-masing. Perudingan bersifat interaktif, dan membutuhkan aktor untuk memperhitungkan kepentingan aktor lain)

Dalam rana internasional, kerjasama merupakan suatu tindakan yang dianggap sebagai arena dalam tuntutan yang dimana membahas mengenai kepentingan akan aktor-aktor yang disebabkan karena keterbatasan yang melekat dalam diri negara yang menjalin kerjasama.

Dalam kepentingan nasional, terdapat hal pembeda yang mendasar yakni, pertama, kepentingan nasional yang bersifat *vital* atau esensial, dan yang kedua ialah kepentingan nasional yang bersifat *non-vital* atau sekunder. Kepentingan *vital* menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kearah keadaan darurat suatu negara sehingga negara harus segera mengambil tindakan. Sementara itu, Kepentingan *non-vital* digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasil dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dengan jangka waktu yang lama. Dalam analisis sebuah kepentingan nasional, peran aktor dalam hal ini yaitu negara, akan mengejar apapun yang dapat membentuk dan mempertahankan, pengendalian dari suatu negara atas negara lain (Jemandu, 2008: 67-69).

Kepentingan nasional tercipta dari keinginan dan kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dpat dilihat dari berbagai kondisi internalnya, baik dari kondisi

Politik-Ekonomi, Militer, maupun Sosial-Budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu kekuatan yang ingin diciptakan sehungga negara dapat memberikan dampak langsung atas pertimbangan negara untuk dapat diakui dunia internasional. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terdapat dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara.

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar Power, dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara control suatu negara terhadap negara lain.

Kepentingan nassional termasuk dalam vision dan diperjuangkan oleh suatu bangsa atau negara untuk dipergunakan dalam rangka ketertiban internasional. Konsep ini adalah buatan manusia dan dirumuskan oleh pemimpin-pemimpin negara dan para ahli teori politik dan dipatuhi oleh masyarakat, Karena disangkutkan pada situasi sossial dan mencerminkan adanya nilai-nilai, ide-ide, kepentingan golongan dan juga kepentingan para perumusnya.

Kepentingan nasional bukanlah suatu teori yang terperinci, akan tetapi lebih banyak dipergunakan pada waktu-waktu pemilihan apa saja dalam bentuk simbol atau slogan. Kepentingan nasional dibentangkan kepada rakyat sebagai doktrin dan dalam suatu negara, kepentingan nasional itu dapat berubah-ubah susuai

waktu, situasi dan kondisi. Kepentingan nasional sebagai keseluruhan, sulit untuk dirumuskan dan ada kalanya disamakaan dengan misi atau kewajiban negara atau bangsa *(raison d'etat,* atau *mission of a nation)* yang tampaknya kabur dan bersifat dogmatis dan oleh karena itu tidak diperkenankan untuk dirundingkan atau diperbincangkan.

Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional. Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi (Perwita, 2006: 35).

### 2.1.5 Politik Internasional

Salah satu kajian pokok (*core subject*) dalam Hubungan Internasional adalah Politik Internasional yang mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*Power*). Politik internasional merupakan salah satu wujud dari interaksi dalam hubungan internasional. Politik internasional membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat internasional dalam arti yang lebih sempit, yaitu dengan berfokus pada diplomasi dan hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya.

Politik internasional seperti halnya politik domestic terdiri dari elemen-elemen kerjasama dan konflik, permintaan, dan dukungan, gangguan dan pengaturan. Negara membuat pembedaan antara kawan dan lawan, politik internasional memandang tindakan suatu negara sebagai respon atas tinakan negara lain, dengan kata lain politik internasional adalah proses interaksi antara dua negara atau lebih (Perwita, 2006: 41-42).

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Saat ini setiap negara pasti memiliki hubungan atau interaksi dengan negara lainnya yang mengarah kepada kerjasama, persaingan maupun konflik. Setiap negara di dunia ini pasti akan sangat mengindari konflik, karena dapat menimbulkan atau menyebabkan kerugian materil ataupun non materil terhadap negara yang memulai konflik tersebut. Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, pola hubungan atau interaksi dapat berupa kerjasama (*coorperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*).

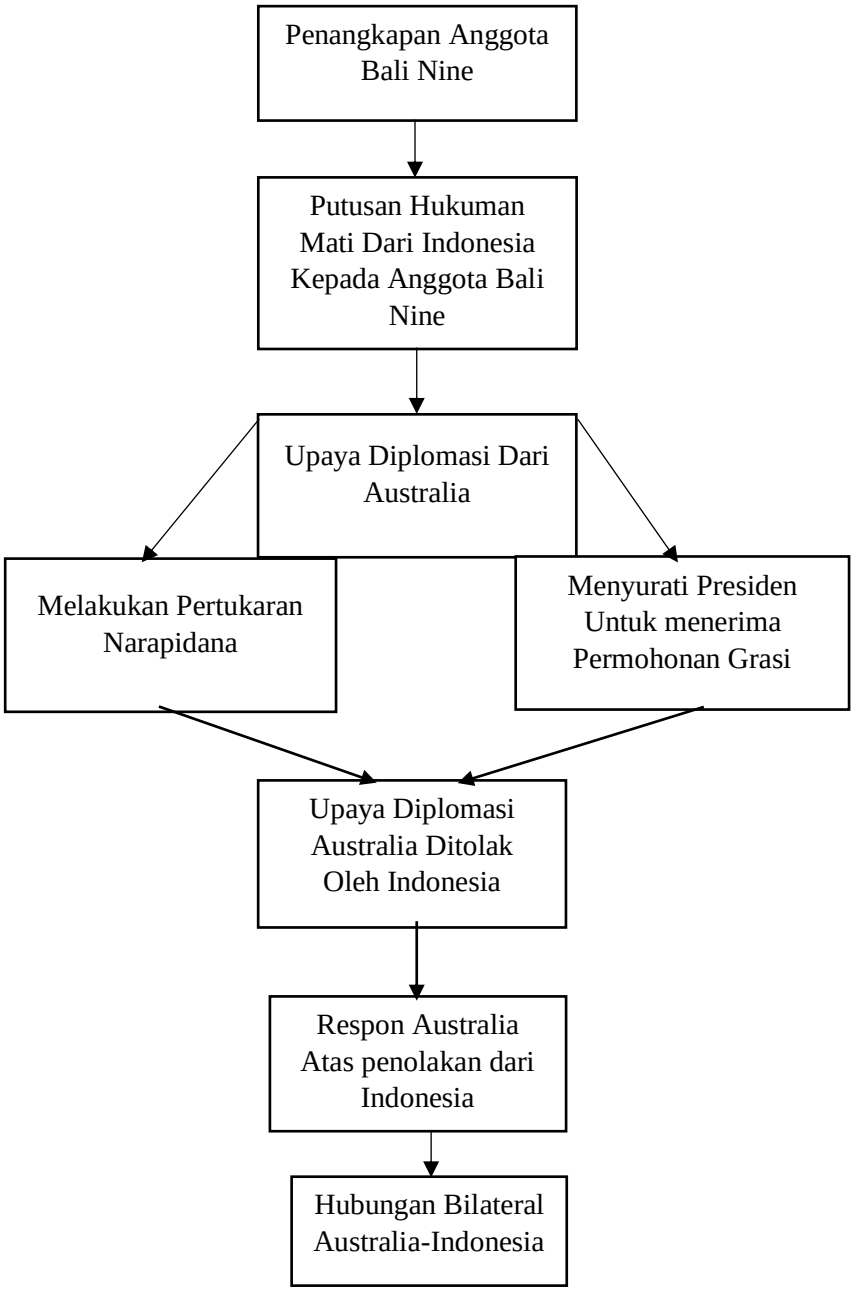
Banyak cara yang dapat di gunakan oleh negara untuk menyelesaikan konflik salah satunya yaitu diplomasi. Diplomasi merupakan sebuah cara yang di gunakan oleh aktor-aktor internasional seperti negara yang berupaya dan berusaha menyelesaiakan konflik dengan salah satu cara yaitu negosiasi. Seperti negara Australia yang melakukan diplomasi dalam menyelesaikan permasalahan Bali Nine, Australia sendiri melakukan diplomasi dengan cara bernegosiasi dengan Indonesia dengan tujuan mendapatkan kepentingan nasionalnya. Diplomasi dalam

dunia politik, mengacu pada proses komunikasi antara aktor-aktor international yang berusaha menyelesaikan konflik dengan cara negosiasi.

Pemerintah Australia sendiri melakukan berbagai upaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan Bali Nine yang terjadi antara Australia dengan Indonesia, dalam kasus Bali Nine ada kepentingan nasional Australia yang ingin dicapai oleh Australia tersebut yakni dapat mengurangi hukuman mati kepada terpidana hingga dapat membebaskan warga negaranya agar mendapatkan hak untuk hidup. Kepentingan nasional Australia sendiri mengarah kepada kepentingan vital, dimana dalam kasus Bali Nine ini terjadi keadaan darurat yang mengharuskan Australia segara mengambil tindakan. Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut digunakan, dimana lebih kearah keadaan darurat atau mendesak dari suatu negara sehingga negara harus segara mengambil tindakan .

Dalam kasus Bali Nine tersebut, berbagai upaya negosiasi telah dilakukan Australia salah satunya adalah dengan pertukaran narapidana antara Indonesia dan Australia, namun upaya tersebut gagal karena Indonesia menolak negosiasi tersebut dan tetap menjalankan hukuman mati terhadap warga negara Australia tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa upaya negosiasi Australia tersebut gagal dan Australia juga sangat dirugikan atas apa yang telah Australia lakukan. Dengan kata lain bahwa tidak ada "*win-win solution"* dalam proses negosiasi tersebut yang dimana Indonesia tetap melanjutkan keinginannya atas hukuman mati sementara disisa lain Australia harus menerima dengan kecewa kerena keinginannya untuk memberikan hak hidup kepada warganya gagal atas hasil akhir yang di capai dalam upaya negosiasi tersebut. Pada hakekatnya tujuan

melakukan negosiasi adalah untuk menghasikan *win-win solution* melalui saling pemahaman dari kedua belah pihak yang bernegosiasi, dimana di antara keduanya memperoleh apa yang diinginkan masing-masing, serta di antara mereka tidak ada yang dirugikan. Ketergantungan timbal Balik inilah yang melandasi adanya kesempatan untuk memperjuangkan suatu kepentingan (Patrice, 2013: 9).




**Gambar 2.1**

**Model Kerangka pemikiran**